

EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) DI KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

***Eva Iriani¹⁾, Teguh Pramono²⁾, Imam Fachrudin³⁾**

1), 2), 3) Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: Iriani.eva@gmail.com

Submitted: 04-12-2024 | Accepted: 22-05-2025 | Published: 23-05-2025

Kata Kunci:

*Efektivitas;
Keluarga
Sejahtera;
Satyagatra*

Abstrak

Ketahanan keluarga berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan fisik dan emosional anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah melalui Program Sekolah Lansia Tangguh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi di Balai Penyuluhan Kecamatan Peterongan. Peneliti menggunakan tiga indikator efektivitas dari Duncan: pencapaian tujuan, interaksi, dan adaptasi. Teknik purposive dan snowball sampling digunakan untuk menentukan informan, sementara wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi metode pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program PPKS di Kecamatan Peterongan belum optimal. Pencapaian tujuan berjalan baik, namun sosialisasi dan adaptasi program masih kurang efektif. Faktor pendukung program adalah sinergi antar pelaksana, adanya insentif transportasi, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Namun, faktor penghambat mencakup ketiadaan SK pembentukan PPKS, kurangnya SOP pelayanan, minimnya sosialisasi, dan metode sosialisasi yang masih konvensional.

Keywords:

*Effectiveness;
Prosperous
family;
Satyagatra.*

Abstract

Family resilience plays an important role in creating the physical and emotional well-being of family members. This research aims to analyze the effectiveness of the Family Welfare Service Center Program (PPKS) in Peterongan District, Jombang Regency, as well as supporting and hindering the implementation of government policies through the Tangguh Elderly School Program. This study uses a descriptive qualitative method with a location at the Peterongan District Counseling Center. Researchers used three indicators of Duncan's effectiveness: goal achievement, interaction, and adaptation. The purposive and snowball sampling techniques are used to determine informants, while interviews, observations, and documentation

are methods of data collection. Analysis of the data was conducted using Miles and Huberman's interactive models. The research results show that the effectiveness of the PPKS Program in Peterongan District has not been optimal. The goal achievement went well, but the socialization and adaptation of the program were still not effective. The supporting factors for the program are synergy between implementers, transportation incentives, and the conformity of the program to the needs of the community. However, the inhibitory factors include the absence of a PPKS establishment decree, the lack of service SOPs, the lack of socialization, and the still conventional socialization methods.

PENDAHULUAN

Ketahanan keluarga adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman keluarga dalam mengarungi kehidupan. Pada perjalanannya, setiap individu dalam keluarga menghadapi berbagai halangan sehingga keselarasan fungsi keluarga di perlukan sebagai upaya pembentukan kesejahteraan secara fisik dan emosional (Heru Widodo et al., 2022). Ketahanan keluarga berfungsi sebagai indikator untuk melihat sejauh mana sebuah keluarga mampu melaksanakan berbagai peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab untuk peningkatan kesejahteraan keluarga (Infitah et al., 2019; Najidah & Lestari, 2019)

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidaktahanan keluarga dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tekanan psikologis yang dialami kedua orang tua, cara mereka menafsirkan konflik keluarga, adanya rasa curiga di antara pasangan, sikap egois, serta kurangnya penerapan prinsip demokrasi dalam keluarga. Di sisi lain, faktor eksternal yang dapat memicu perceraian atau konflik dalam keluarga meliputi keterlibatan pihak ketiga, pergaulan yang buruk dari salah satu anggota keluarga, munculnya isu negatif terhadap kedua belah pihak, serta kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam keluarga. (Nipfasari, 2024)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi landasan hukum yang solid untuk mengelola pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga di Indonesia. Dalam Pasal 47 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah harus merumuskan kebijakan pembangunan keluarga yang berorientasi pada pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung keluarga dalam menjalankan perannya secara optimal.

Pentingnya ketahanan keluarga, terutama pada masa awal pandemi dalam kurun waktu 2020 dan masih berlangsung hingga kini. Keluarga yang kurang memiliki ketahanan cenderung rentan menghadapi masalah, baik dari dalam maupun dari lingkungan luar. Permasalahan-permasalahan ini memberikan dampak negatif yang signifikan, baik secara fisik maupun emosional, kepada anak-anak, orang tua, dan keluarga secara keseluruhan. Di antara isu-isu tersebut, terdapat angka perceraian yang tinggi, prevalensi balita yang mengalami stunting, perilaku seksual di luar ikatan pernikahan, perkawinan pada usia dini, serta angka kematian ibu dan bayi yang masih mengkhawatirkan. Selain itu, kasus bunuh diri di kalangan remaja, kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta berbagai persoalan lain dalam konteks keluarga juga menjadi sorotan. Semua isu ini timbul karena ketidakmampuan orang tua dalam memberikan perlindungan yang layak kepada anggota keluarganya..

Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah inisiatif BKKBN yang bertujuan mempercepat tercapainya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Dengan mengacu pada regulasi nasional, PPKS menyediakan layanan komunikasi, informasi, edukasi, konsultasi, dan konseling terkait kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga sebagai upaya memperkuat Ketahanan Keluarga di Indonesia.

Salah satu Daerah yang melaksanakan Program PPKS adalah Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Luas wilayah dari Kecamatan Peterongan yaitu 29,45 km dan terdiri dari 14 desa. Jumlah penduduk 71.587 jiwa yang tersebar di 24.027 KK. Besaran Jumlah KK tersebut sepanjang tahun 2022 hanya sekitar 20 Keluarga yang memanfaatkan program PPKS ini dengan pemanfaatan pelayanan masalah alat kontrasepsi. Selebihnya pelayanan yang lain belum di manfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Peterongan. Rendahnya pemanfaatan Program PPKS di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang tidak sejalan dengan jumlah Perceraian yang mencapai 20 kasus (BPS Kabupaten Jombang).

Berdasarkan beberapa Deskripsi yang telah di jelaskan di atas, maka Peneliti tertarik untuk membahas tentang “Efektivitas Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2022”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dimana dilakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Sugiyono, 2018). Peneliti menetapkan wilayah Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi ini karena program ini sangat penting bagi kelangsungan ketahanan Keluarga di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang namun pemanfaatan Program ini oleh masyarakat masih sangat minim. Dalam penelitian ini, focus penelitian merujuk pada pendapat Duncan mengenai 3 indikator dalam efektivitas yang meliputi: pencapaian tujuan, interaksi, dan adaptasi (Tangkilisan, 2005; Usman & S, 2019). Teknik penentuan informan atas dasar pertimbangan penguasaan dan kedalaman informasi (purposive sampling). Informan penelitian meliputi: Kabid ketahanan kesejahteraan keluarga, camat peterongan, kader kemasyarakatan, PKB Kec. Peterongan, dan sejumlah masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Penelitian ini terdiri dari 4 tahap pengolahan data sesuai dengan teori analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2022

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu rangkaian proses yang berkesinambungan. Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan akhir, diperlukan langkah-langkah bertahap, baik berupa pencapaian sebagian tujuan secara berurutan maupun melalui tahapan yang disusun berdasarkan periode waktu tertentu (Silalahi, 2018; Widodo & Susilowati, 2014). Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

a) Kurun Waktu

Berdasarkan hasil analisis proses perencanaan, dan pelaksanaan program pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2022 pada sub-indikator kurun waktu, tahap perencanaan dan persiapan program berlangsung selama satu tahun, dimulai pada 2021 hingga

2022. Proses ini melibatkan identifikasi permasalahan, penentuan jenis pelayanan yang diperlukan, dan peninjauan kesiapan sumber daya, termasuk gedung, pengelola, serta anggaran. Selain itu, Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan dan pengelolaan PPKS juga dibuat untuk memberikan legalitas pada pelaksanaan program.

Program layanan PPKS mulai dijalankan pada 10 Januari 2022 dengan cakupan delapan bentuk layanan utama. Layanan tersebut meliputi penyediaan informasi serta data terkait kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga; pemberian bimbingan serta pendampingan untuk keluarga yang memiliki balita maupun anak; layanan konseling bagi remaja serta keluarga remaja; pendampingan pranikah; konseling mengenai program keluarga berencana dan isu kesehatan reproduksi; bimbingan demi menciptakan keharmonisan keluarga; layanan khusus untuk mendampingi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia; serta pelaksanaan pembinaan guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Masing-masing layanan memiliki durasi yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, pelayanan data dan informasi membutuhkan waktu mulai dari satu hari hingga satu minggu, sedangkan pelayanan konsultasi disesuaikan dengan kebutuhan individu yang memanfaatkannya. Program ini dirancang agar fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan keluarga sejahtera.

b) Sasaran

Berkaitan dengan tujuan dan target Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Peterongan berfokus pada pengembangan kehidupan keluarga agar lebih sejahtera. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan PPKS dilaksanakan dengan pelayanan komunikasi informasi dan edukasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga melalui konsultasi dan konseling sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Sediyarningsih et al., 2023.)

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan consensus (Sutrisno, 2016). Integrasi menyangkut proses sosialisasi Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan Peterongan di lakukan melalui pertemuan dengan masyarakat di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Peterongan dengan Bukti Dokumentasi kegiatan sebagai berikut.

Gambar 1
Dokumentasi Sosialisasi di Balai Penyuluhan dengan Masyarakat



Sumber. Kabag Umum Kecamatan Peterongan, 2024

Berdasarkan Dokumentasi tersebut, sosialisasi dilaksanakan di Balai Penyuluhan dengan frekuensi Sembilan kali pertemuan selama tahun 2022 dengan tema yang berbeda-beda setiap pertemuannya. Sebagai bahan penguat dokumentasi foto kehadiran sosialisasi, peneliti melampirkan daftar hadir dari kegiatan ini

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Ukuran Tingkat Efektifitas Mengukur efektivitas organisasi bukan suatu hal yang sangat sederhana, karena Efektivitas dapat di kaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikan (Samba'A et al., 2018; Sudarmanto, 2015). Tingkat efektivitas juga dapat di ukur dengan membandingkan antara rencana yang telah di tentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan (Winarno, 2016). adaptasi Program PPKS belum berjalan baik karena jumlah masyarakat yang

masih minim memanfaatkan program untuk berkonsultasi dengan berbagai jenis layanan. hal ini diperkirakan merupakan dampak sosialisasi yang belum secara massif sehingga turut andil terhadap minimnya masyarakat yang memanfaatkan program pelayanan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan Peterongan tahun 2022 yang nampak pada data sebagai berikut.

Tabel 1.

Jumlah Klien Konseling tahun 2022-2023

JENIS PELAYANAN	Tahun		KET
	2022	2023	
Pelayanan Data dan Informasi Bangga Kencana	48	36	Kader
Pelayanan Konsultasi dan Konseling Balita dan Anak	4	2	Kader
Pelayanan Konsultasi dan Konseling Pra Nikah	8	8	Masyarkat
Pelayanan Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja	-	-	
Pelayanan Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia	-	-	
Pelayanan Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2	1	Masyarkat
Pelayanan Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis	3	1	PKB
Pelayanan Konsultasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	-	-	
JUMLAH	65	48	

Sumber. Sub bagian Umum, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari 8 jenis pelayanan dalam satu tahun 2022 hanya 65 orang yang berkonsultasi di 5 jenis pelayanan PPKS Kecamatan Peterongan. Jumlah masyarakat yang masih minim memanfaatkan program untuk berkonsultasi dengan berbagai jenis layanan. diperkirakan merupakan dampak sosialisasi yang belum secara massif sehingga turut andil terhadap minimnya masyarakat yang memanfaatkan program pelayanan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan Peterongan tahun 2022

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Program Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2022.

1. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat Program PPKS di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2022 yang pertama yaitu terkait dengan pencapaian tujuan. Pada sub-indikator waktu, ditemukan bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) pembentukan PPKS yang dibuat selama masa persiapan dan perencanaan. Hal ini memang mempercepat pelaksanaan, namun tidak sesuai dengan peraturan legal yang ada, yaitu Peraturan

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017. Selain itu, tidak dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus di Kecamatan Peterongan juga menjadi hambatan. SOP seharusnya menjadi turunan dari SOP umum yang sudah diatur dalam buku panduan PPKS oleh BKKBN. Pada sub-indikator target kongkret, meskipun tujuan PPKS sudah diatur dalam peraturan yang sama, pelaksanaan di Kecamatan Peterongan belum optimal. Pelayanan yang diharapkan meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kependudukan dan keluarga berencana. Namun, tanpa adanya legalitas yang memadai dan SOP yang jelas, pencapaian target untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera belum terlaksana dengan baik.

Faktor penghambat kedua adalah integrasi program yang lemah, terutama dalam proses sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan hanya menggunakan cara konvensional dengan jumlah pertemuan yang sangat terbatas, yaitu hanya delapan kali dalam setahun, dengan peserta yang dibatasi hanya delapan orang per sesi. Minimnya inovasi dalam media sosialisasi, seperti tidak menggunakan media sosial, brosur, atau pamflet, menyebabkan informasi program PPKS tidak tersebar luas. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap program masih sangat terbatas.

Faktor penghambat ketiga adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program PPKS. Meskipun program ini dirancang untuk memberikan layanan penting bagi kesejahteraan keluarga, partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang maksimal, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui manfaat dan jenis layanan yang disediakan. Dari data tahun 2022, hanya 65 orang yang memanfaatkan layanan PPKS, dan mereka hanya menggunakan 5 dari 8 jenis layanan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, edukasi, dan aksesibilitas layanan agar program PPKS dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung dari Program PPKS di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2022 pada indikator pencapaian tujuan Program PPKS di Kecamatan Peterongan adalah sinergitas antar pelaksana kegiatan PPKS di Kecamatan Peterongan sehingga mampu melaksanakan beberapa tahap dari perencanaan dan pelaksanaan dalam jangka waktu satu tahun terhitung mulai 2021 sampai 2022 sesuai dengan Buku

Panduan Pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Balai Penyuluhan. kedua, faktor pendukung integrasi pelaksanaan program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan Peterongan adalah adanya uang transport yang diberikan oleh panitia pelaksana kepada masyarakat sebesar Rp. 47.000,00 setelah kena pajak sebesar 6% dari jumlah total yang diberikan Rp. 50.000,00. Sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Ketiga, Faktor pendukung dalam pencapaian target program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan Peterongan adalah Kesesuaian program PPKS terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga kedepannya apabila hal teknis seperti pemenuhan sarana dan prasarana, optimalisasi inovasi sosialisasi kepada masyarakat dan hal teknis lainnya dapat di lakukan maka program ini akan berjalan sesuai rencana yang tertera pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan komunikasi informasi dan edukasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga melalui konsultasi dan konseling sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Program PPKS di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Tahun 2022 belum dapat dikatakan efektif. Meskipun pencapaian tujuan program sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan serta panduan, terdapat masalah dalam aspek integrasi dan adaptasi. Sosialisasi program yang hanya menggunakan cara konvensional, seperti pertemuan warga, kurang maksimal tanpa inovasi media modern seperti media sosial atau brosur. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program masih minim, sehingga target kesejahteraan belum tercapai. Faktor pendukung keberhasilan program mencakup sinergi antar pelaksana, dukungan transportasi bagi masyarakat, dan kesesuaian program dengan kebutuhan mereka. Namun, ada beberapa hambatan, seperti ketiadaan SK Pembentukan PPKS BP, tidak adanya SOP pelayanan, serta kurangnya sosialisasi dan inovasi dalam pendekatan komunikasi.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah diperlukan legalitas Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Pengelola dan Pelaksana Program Kelompok Swadaya Bantuan Pangan (PPKS BP) yang terpisah agar fungsi dan tanggung jawabnya lebih jelas dan terstruktur, tidak digabungkan dalam satu SK yang sama. Selain itu, pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus sebagai turunan dari SOP umum pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dalam pelaksanaan program. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, jumlah pertemuan dengan masyarakat harus ditingkatkan secara kuantitatif sehingga jangkauan dan pemahaman masyarakat menjadi lebih luas. Penambahan inovasi media sosialisasi juga penting dilakukan, seperti pemanfaatan media sosial, pamflet, brosur, dan berbagai media komunikasi lainnya guna menjangkau masyarakat secara lebih efektif dan interaktif.

REFERENSI

- Heru Widodo, M., Rohmad Jatmiko, A., Fathur Rohman, M., Ekonomi Pembangunan, J., & Ekonomi, F. (2022). ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (PKM) DI KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal EBA*, 9(2).
- Infitah, N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(2), 103. <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i2.11346>
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Nipfasari, S. (2024). Efektivitas Pelayanan Keluarga Sejahtera Melalui Website Siap Bahagia Di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 12(2), 657–666.
- Samba'A, N. A., Rorong, A. J., & Ruru, J. M. (2018). Efektivitas Prosedur Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(65).
- Sediyarningsih, S., Rachman, A. S., & Rusli, Y. (n.d.). ANALISIS MODEL KOMUNIKASI PEMBENTUKAN KONSEP KELUARGA SEJAHTERA DI INDONESIA (Studi terhadap sosialisasi program BKKBN kota Depok dan kota Bogor). <http://www.lusa.web.id/perkembangan-kb->

- Silalahi, U. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. PT Revika Aditama.
- Sudarmanto. (2015). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana.
- Usman, H. A., & S, P. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara.
- Widodo, D. H., & Susilowati, H. (2014). Modul Diklat Analisis Kepegawaian. *Rekrutmen Pegawai*, 2(2), 16–19.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Penerbit. Media Pressindo.